

**RESPONS PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BEBERAPA KLAIM
UNSUR KEBUDAYAAN OLEH MALAYSIA 2007 – 2019**

TESIS



ABRAR HALIM
NIM 2220712003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN SEJARAH
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

**RESPONS PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BEBERAPA KLAIM
UNSUR KEBUDAYAAN OLEH MALAYSIA 2007 – 2019**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan
Gelar Magister Humaniora dalam Ilmu Sejarah*



Oleh

ABRAR HALIM
NIM 2220712003

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN SEJARAH
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Beberapa Klaim Unsur Kebudayaan Oleh Malaysia 2007 - 2019 ini membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kebudayaan pada periode 2007–2019, implementasinya, respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta pengaruh kegiatan kebudayaan terhadap hubungan bilateral dan internasional. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebudayaan sebagai elemen strategis dalam memperkuat identitas nasional, memajukan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya, serta sebagai alat diplomasi dalam hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis Deskriptif Kualitatif mengandalkan sumber primer yang meliputi buku, dokumen, dan arsip kebijakan kebudayaan Indonesia pada periode 2007–2019, baik dalam bentuk tulisan maupun foto. Selanjutnya sumber sekunder yang memberikan informasi tidak langsung, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan situs online yang kredibel. Setelah itu penulis juga mengumpulkan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung di bidang kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecerumpan antara Indonesia dan Malaysia tercermin dari kedekatan sejarah dan budaya yang memunculkan konflik berupa klaim kebudayaan oleh Malaysia atas sejumlah warisan budaya Indonesia, seperti tari Pendet, Reog Ponorogo, batik, dan seni kuliner tradisional. Kasus-kasus klaim tersebut menegaskan pentingnya penguatan perlindungan budaya sebagai bagian dari kedaulatan identitas bangsa. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan langkah-langkah konkret, termasuk mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO, memperkuat diplomasi budaya, serta menetapkan regulasi perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai reaksi atas klaim budaya, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Dengan demikian, pengelolaan kebudayaan yang sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan ketahanan budaya Indonesia di tengah dinamika global serta potensi sengketa budaya di kawasan.

Kata Kunci: Kebijakan kebudayaan, klaim kebudayaan, UNESCO.

ABSTRACT

The research entitled “The Indonesian Government’s Response to Several Claims of Cultural Elements by Malaysia, 2007–2019” discusses the Indonesian government’s cultural policies during the 2007–2019 period, their implementation, the public response to these policies, and the influence of cultural activities on bilateral and international relations. This study is based on the importance of culture as a strategic element for strengthening national identity, enhancing public awareness of cultural heritage, and serving as a tool of diplomacy in international relations.

This research employs a qualitative descriptive historical approach, relying on primary sources that include books, documents, and archives of Indonesian cultural policies during the period 2007–2019, both in written form and photographs. In addition, secondary sources that provide indirect information—such as books, journals, research reports, and credible online sites—are also used. The researcher also collected oral sources obtained through interviews with parties directly involved in the cultural sector.

The research findings indicate that the cultural affinity between Indonesia and Malaysia is reflected in their shared historical and cultural background, which has given rise to conflicts in the form of Malaysia’s claims over several Indonesian cultural heritages, such as the Pendet dance, Reog Ponorogo, batik, and traditional culinary arts. These claim cases underline the importance of strengthening the protection of culture as part of the nation’s identity sovereignty. The Indonesian government has responded with concrete measures, including registering cultural heritage with UNESCO, strengthening cultural diplomacy, and establishing regulations for the protection of culture-based intellectual property.

The conclusion of this study is that these policy efforts not only function as a reaction to cultural claims but also serve as a proactive strategy to safeguard, preserve, and promote Indonesian culture at the international level. Thus, systematic and collaborative cultural management between the government, society, and stakeholders becomes the key to ensuring the sustainability and resilience of Indonesian culture amid global dynamics and potential cultural disputes in the region.

Keywords: Cultural policy, cultural claims, UNESCO.